



## **Analisis Prosedur Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pada Dinas Koperasi Kabupaten Bandung**

**Marshanda Ridia Amelia<sup>1\*</sup>, Rikhe Dwi Nurdiyah<sup>2</sup>, Mashudi<sup>3</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

### **Informasi Artikel**

\*Corresponding Penulis :

[230721100110@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230721100110@student.trunojoyo.ac.id)



This is an open access article under the CC BY license

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

### **ABSTRACT**

Cooperatives play an important role in strengthening the economy of members and the community, by prioritizing the principles of family and economic democracy. The process of establishing a cooperative is a crucial step that aims to ensure the sustainability and resilience of the business amidst social and economic changes. As a collective forum, cooperatives function to meet the various needs of their members, from savings and loans, consumption, production, to marketing and services. In order for cooperatives to operate effectively, a solid capital structure, clear legality, and establishment procedures are required in accordance with applicable legal provisions. This study also describes the various obstacles faced in establishing cooperatives in Bandung Regency, such as minimal fulfillment of administrative requirements, limited human resources, and capital problems. In addition, this study offers a cooperative development strategy that emphasizes the implementation of good governance, membership promotion, and innovation of savings and loan products, in order to support the sustainability of cooperative businesses.

**Keywords:** *cooperatives, establishment of cooperatives, cooperative procedures, obstacles to establishing cooperatives, Bandung Regency*

### **ABSTRAK**

Koperasi memegang peranan penting dalam memperkuat perekonomian anggota dan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Proses pendirian koperasi merupakan langkah krusial yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan dan ketahanan usaha di tengah perubahan sosial dan ekonomi. Sebagai wadah kolektif, koperasi berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggotanya, mulai dari simpan pinjam, konsumsi, produksi, hingga pemasaran dan jasa. Agar koperasi dapat beroperasi secara efektif, diperlukan struktur modal yang solid, legalitas yang jelas, serta prosedur pendirian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menguraikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pendirian koperasi di Kabupaten Bandung, seperti minimnya pemenuhan persyaratan administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan masalah permodalan. Selain itu, studi ini menawarkan strategi pengembangan koperasi yang menekankan pada penerapan tata kelola yang baik, promosi keanggotaan, serta inovasi produk simpan pinjam, guna mendukung keberlanjutan usaha koperasi.

**Kata kunci:** *Koperasi, Pendirian Koperasi, Prosedur Koperasi, Kendala Pendirian Koperasi, Kabupaten Bandung*

## **PENDAHULUAN**

Koperasi memiliki peran dan fungsi yang penting dalam membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya, serta masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial, serta secara aktif berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Koperasi juga berkontribusi dalam memperkuat perekonomian rakyat sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional, dengan koperasi sebagai pilar utamanya. Melalui kerjasama yang berlandaskan prinsip-prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, kita berupaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional (Haryono 2022).

Pendirian koperasi merupakan langkah yang sangat penting dalam perjalanan hidup sebuah koperasi. Koperasi, yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan dan solidaritas, perlu didirikan dengan dasar yang kuat sejak awal. Proses pendirian yang dilakukan dengan

cermat bukan hanya sekadar langkah awal untuk mengaktifkan koperasi, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi yang memastikan koperasi dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan ekonomi dan sosial yang terus berlangsung (Abdurohim, 2023).

Penting untuk dipahami bahwa koperasi umumnya dibentuk dan tumbuh di tengah kelompok masyarakat yang memiliki beragam kehidupan dan budaya. Meskipun terdapat perbedaan di antara mereka, koperasi memiliki tujuan bersama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan semua anggota sebaik mungkin, terlepas dari kondisi ekonomi, sosial, maupun politik yang beragam. Selain itu, koperasi juga dibentuk berdasarkan pengalaman dan untuk mengakomodasi unsur-unsur budaya lokal. Pengorganisasian koperasi dapat dilakukan dengan mengelompokkan anggota yang memiliki kesamaan, seperti kelompok konsumen, produsen, penabung, peminjam dana, dan pemasar produk (Wira et al. 2021).

Agar koperasi dapat berfungsi dengan baik, diperlukan modal yang berasal dari sumber internal, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang harus disetor secara seragam oleh anggota saat bergabung dengan koperasi. Dana ini tidak dapat diambil kembali selama anggota tersebut masih terdaftar. Sementara itu, simpanan wajib merupakan setoran yang jumlahnya bervariasi dan harus dibayarkan oleh anggota pada waktu tertentu, dan juga tidak dapat ditarik selama mereka masih menjadi anggota koperasi (Wahyudi 2023).

Koperasi harus memiliki badan hukum untuk beroperasi secara sah. Jika ada koperasi yang beroperasi tanpa izin atau tidak berbadan hukum, maka koperasi tersebut akan dibubarkan dan dikenakan sanksi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, khususnya pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa pendirian lembaga keuangan mikro harus memenuhi beberapa unsur, antara lain berbentuk badan hukum, memiliki permodalan, dan memperoleh izin. Selain itu, ketentuan ini juga diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian, terutama pada Pasal 9 hingga 14 yang menjelaskan tentang status badan hukum koperasi (Diniyarti 2020).

### **Pengertian Prosedur**

Prosedur dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah-langkah pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa individu. Istilah ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang diperlakukan dengan konsisten (Narko 2004).

Sebagai bagian integral dari sebuah sistem, prosedur mencakup rangkaian tindakan yang melibatkan satu atau lebih orang, dengan tujuan utama untuk menjamin pelaksanaan kegiatan usaha atau transaksi secara teratur dan seragam (Ardiyos 2004).

Dalam praktiknya, prosedur meliputi berbagai kegiatan klerikal, seperti menulis, menggandakan, menghitung, dan membandingkan data dari sumber dengan data pendukung yang berasal dari kedua belah pihak. Umumnya, prosedur ini melibatkan sejumlah orang dalam satu departemen atau lebih, untuk memastikan bahwa setiap transaksi perusahaan yang berulang ditangani secara konsisten dan merata (Mulyadi 2008).

### **Pengertian Koperasi**

Koperasi, menurut Mohammad Hatta, merupakan usaha kolektif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan dasar prinsip saling membantu. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, koperasi didefinisikan sebagai organisasi ekonomi yang bersifat sosial dan dikelola berdasarkan prinsip kekeluargaan. Sementara itu, di Jerman pada tahun 1988, koperasi dipahami sebagai kumpulan yang anggotanya terbuka, dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi anggota melalui penyelenggaraan usaha bersama (Mukhtar Abdul Kader 2018).

Koperasi dapat dipahami sebagai suatu badan usaha yang terdiri dari sekelompok individu, di mana kegiatan mereka berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi. Selain itu, koperasi juga merupakan gerakan ekonomi yang mengedepankan asas kekeluargaan (Mare, Yana, and Mandiri 2022).

### **Pengertian Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang pengumpulan simpanan dan pemberian pinjaman uang kepada anggotanya (Idris 2021). Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan non-bank yang menghadirkan layanan untuk menerima simpanan atau tabungan dari anggotanya, serta memberikan pinjaman uang atau kredit. Prinsip utama koperasi ini adalah membantu anggotanya dalam

menyimpan uang dan memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Berbeda dengan perbankan dan lembaga keuangan lain, prosedur serta persyaratan di koperasi yang sering disebut KSP atau Kospin Jasa ini cenderung lebih sederhana dan cepat (Arnesya 2025).

### **Tujuan dan Fungsi Koperasi**

Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara luas. Menurut Shindi (2024), koperasi bertumpu pada pengembangan potensi sosial dan ekonomi, baik anggota maupun masyarakat umum. Dalam konteks koperasi syariah, tujuan tersebut diperluas dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan nilai-nilai keislaman seperti amanah, fathonah (profesionalisme), dan istiqomah dalam menjalankan prinsip ekonomi Islam. Lebih jauh, koperasi juga berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, di mana prinsip kerja sama menjadi pilar dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Koperasi berfungsi sebagai sarana untuk mendemokrasikan kehidupan sosial ekonomi, mendorong solidaritas, dan mengurangi individualisme melalui kolaborasi yang saling menguntungkan (Nasution *et al.*, 2024)

### **Jenis dan Syarat Pendirian Koperassi**

Dalam praktiknya, koperasi terbagi dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan dan peranannya dalam masyarakat. Koperasi simpan pinjam berfokus pada penyediaan kredit berbunga rendah bagi anggotanya, sementara koperasi konsumen memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Koperasi produsen membantu pelaku UMKM dalam pengadaan bahan baku, koperasi pemasaran mendukung penjualan produk anggota, dan koperasi jasa bergerak di berbagai bidang layanan (Rochmadi 2011). Untuk mendirikan koperasi, diperlukan pemenuhan syarat administratif tertentu. Koperasi primer dapat dibentuk oleh minimal 20 orang dengan melampirkan dokumen seperti akta pendirian, berita acara rapat, bukti penyetoran modal, dan rencana awal kegiatan (Nurrachmi 2020). Sedangkan koperasi sekunder membutuhkan tambahan dokumen berupa hasil rapat pendirian, keputusan pengesahan badan hukum dari koperasi sebelumnya, serta NPWP aktif dari seluruh calon anggotanya (Malik 2023).

### **METODE PENELITIAN**

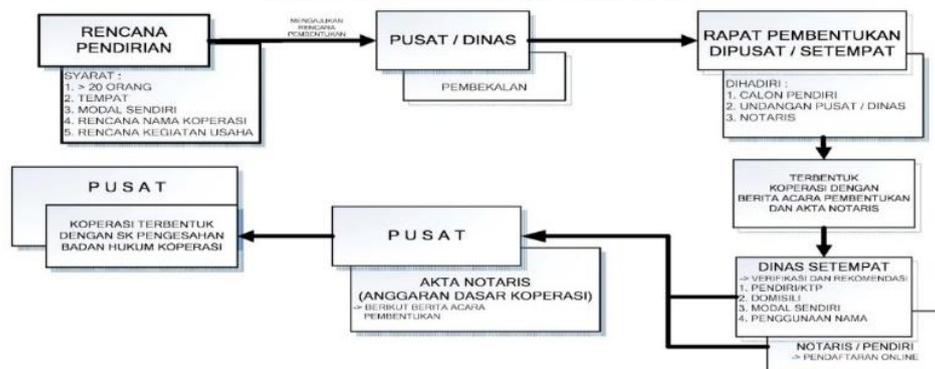
Penelitian ini menggunakan metode library research (studi pustaka) sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena mengumpulkan, membaca, menganalisis berbagai sumber dan faktor – faktor yang terkait dengan Tata cara dan Prosedur pendirian koperasi di kabupaten Bandung. Penelitian berfokus Melalui studi pustaka, peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari dokumen hukum, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan sumber resmi lainnya yang relevan.

Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri ketentuan dan prosedur yang berlaku secara teori dan hukum. Dengan demikian, library research dianggap tepat untuk menggali dan memaparkan prosedur pendirian koperasi di Kabupaten Bandung berdasarkan kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang kami peroleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Bandung, terungkap bahwa hingga saat ini, Dinas tersebut belum memiliki flowchart yang sistematis untuk proses pengajuan izin koperasi. Oleh karena itu, dari hasil kajian lapangan, kami mengusulkan pembuatan flowchart prosedur pendirian koperasi yang dapat diaplikasikan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Bandung, sebagai berikut: (Suryana 2019)

### SKEMA PROSES PEMBENTUKAN KOPERASI DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI



Pendirian koperasi syariah melibatkan beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai prosedur tersebut: (Shindi 2024)

#### a. Berita Acara Rapat Pendirian

Dokumen resmi ini mencatat hasil rapat pendirian koperasi, termasuk keputusan dan kesepakatan yang dicapai oleh para anggota pendiri. Berita acara ini harus dilengkapi dengan daftar hadir yang mencantumkan nama-nama anggota yang hadir, serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh anggota yang ikut dalam rapat.

#### b. Surat Bukti Penyetoran Modal

Dokumen ini menunjukkan bahwa para anggota pendiri telah menyetorkan modal awal yang diperlukan untuk mendirikan koperasi. Setiap anggota pendiri wajib memberikan bukti penyetoran modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

#### c. Rencana Kerja Koperasi

Dokumen ini mendetailkan rencana operasional dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Rencana kerja mencakup berbagai aspek, seperti tujuan koperasi, strategi pemasaran, rencana keuangan, program pengembangan usaha, serta kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat yang direncanakan.

#### d. Data Calon Pengelola Koperasi

Calon pengelola atau pengurus koperasi wajib menyertakan nama dan riwayat hidup mereka sebagai salah satu syarat. Dokumen ini bertujuan untuk menunjukkan kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki calon pengelola sehingga dapat dipastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola koperasi secara efektif.

#### e. Administrasi dan Pembukuan Koperasi

Penting untuk menyusun administrasi dan pembukuan koperasi sesuai dengan karakteristik lembaga keuangan syariah. Hal ini mencakup berbagai blanko dan formulir yang digunakan dalam proses administrasi, seperti blanko pendaftaran anggota, blanko simpanan, blanko peminjaman, blanko pembayaran angsuran, blanko pencairan dana, blanko jurnal transaksi, blanko laporan keuangan, dan blanko rekapitulasi.

### Kendala dalam Proses Pendirian Koperasi di Kabupaten Bandung

Proses pendirian koperasi di Kabupaten Bandung sering kali menghadapi beragam tantangan yang perlu diatasi agar berjalan dengan lancar. Beberapa hambatan utama dalam pengajuan koperasi mencakup aspek administrasi, sumber daya manusia, dan permodalan.

#### 1. Kendala Administrasi

Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaklengkapan dokumen administratif yang diperlukan untuk pendaftaran koperasi. Ketika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, proses pengajuan pun akan terhambat atau bahkan ditolak hingga semua dokumen disiapkan. Banyak pemohon yang kurang mencantumkan visi

dan misi koperasi, daftar pendiri, serta informasi terkait pengelolaan dan permodalan. Sebagai solusi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Bandung perlu menyediakan panduan teknis yang lebih jelas, lengkap dengan contoh dokumen yang diperlukan. Dengan adanya panduan ini, diharapkan pemohon dapat lebih memahami persyaratan administratif yang harus dipenuhi.

## **2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Masalah lainnya adalah keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan koperasi. Kurangnya keterampilan sering kali menyebabkan koordinasi yang minim antara pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Rendahnya kualitas SDM ini sebagian besar bersumber dari pendidikan yang belum berorientasi pada pengembangan koperasi secara optimal. Untuk mengatasinya, perlu ada program pelatihan dan edukasi bagi calon pengurus dan anggota koperasi sebelum mereka mengajukan izin pendirian. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ini sebaiknya dipertimbangkan sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran koperasi.

## **3. Kendala Permodalan**

Koperasi yang baru terbentuk seringkali menghadapi kesulitan finansial yang menghambat pertumbuhannya. Beberapa faktor penyebabnya adalah lemahnya kemampuan dalam menghimpun modal sendiri, rendahnya daya tarik koperasi bagi investor eksternal, serta minimnya inisiatif anggota dalam meningkatkan modal. Untuk mengatasi hambatan ini, koperasi perlu merumuskan strategi yang lebih efektif dalam membangun sumber permodalan serta meningkatkan keterlibatan anggota dalam usaha penghimpunan modal. Dengan memahami dan mengatasi berbagai tantangan tersebut, diharapkan proses pengajuan koperasi di Kabupaten Bandung dapat berjalan lebih efisien dan menghasilkan koperasi yang dapat berkembang secara berkelanjutan (Melati and Sadeli 2017).

## **Strategi Pendirian Koperasi**

Strategi untuk mengembangkan bisnis koperasi yang sukses harus menekankan perbedaan koperasi dari perusahaan keuangan lainnya, yaitu dengan mengedepankan prinsip kerja sama, nilai kesejahteraan bersama, dan norma keadilan. Salah satu langkah penting adalah menyelesaikan masalah internal yang dihadapi koperasi, seperti isu operasional dan manajemen, sebelum menghadapi berbagai tantangan eksternal. Di sisi eksternal, koperasi dapat memperluas akuisisi modal dengan mengeksplorasi sumber pendanaan atau investasi bisnis di luar simpanan anggota, guna mengurangi ketergantungan pada sistem keanggotaan.

Upaya mempromosikan koperasi untuk menarik anggota baru juga sangat krusial, karena hal ini akan meningkatkan sumber daya keuangan dan mendorong pertumbuhan bisnis. Selain itu, merekrut anggota yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman dalam manajemen koperasi adalah kunci untuk kelancaran operasi dan pengembangan koperasi itu sendiri. Untuk menciptakan koperasi yang sukses, penting untuk memiliki tata kelola yang terstruktur dengan baik, termasuk manajemen tugas yang jelas serta pengawasan keuangan yang efektif (Utami 2025).

## **Pengembangan Produk Simpan Pinjam**

Produk mencakup segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dibeli, digunakan, dan dikonsumsi oleh pengguna. Istilah ini mencakup beragam bentuk, termasuk benda fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi, hingga ide. Keputusan terkait produk melibatkan berbagai aspek, seperti kualitas, keunikan, jenis merek, kemasan, serta pengembangan yang didasarkan pada penelitian pasar dan pengujian, baik sebelum maupun setelah pembelian. Dengan kata lain, produk adalah kumpulan atribut yang mencakup aspek fisik dan non-fisik, seperti warna, harga, reputasi pabrik, reputasi pengecer, serta layanan yang diberikan oleh pabrik dan pengecer kepada pembeli untuk memenuhi keinginan mereka.

Dalam mengukur dan merencanakan strategi produk, terdapat delapan dimensi kualitas yang dapat dijadikan variabel. Dimensi-dimensi tersebut adalah: (Idris 2021)

1. Kinerja (Performance): Karakteristik utama dari operasi produk inti.
2. Ciri-ciri atau Keistimewaan Tambahan (Features): Karakteristik sekunder yang melengkapi

produk.

3. Keandalan (Reliability): Kemampuan perusahaan dalam menyediakan produk yang sesuai dengan harapan konsumen.
4. Kesesuaian dengan Spesifikasi (Conformance to Specification): Tingkat di mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan.
5. Daya Tahan (Durability): Lama waktu produk dapat digunakan secara efektif.
6. Serviceability: Meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, kemudahan dalam perbaikan, serta penanganan keluhan yang memuaskan.
7. Estetika (Aesthetics): Daya tarik produk terhadap indra, termasuk bentuk fisik dan warna.
8. Kualitas yang Dipersepsikan (Perceived Quality): Citra dan reputasi produk, serta tanggung jawab perusahaan terkait produk tersebut.

## KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan pendirian koperasi di Kabupaten Bandung menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya flowchart yang sistematis untuk memandu prosedur pengajuan izin koperasi. Untuk mengatasi masalah ini, diusulkan pembuatan flowchart yang jelas dan terstruktur guna mempermudah pelaksanaan dan memastikan kelancaran proses tersebut. Flowchart ini mencakup langkah-langkah mulai dari persiapan pendirian koperasi hingga pendaftaran resmi ke Dinas Koperasi dan UKM setempat, dengan fokus pada pemenuhan syarat administrasi dan kelengkapan dokumen.

Dengan menerapkan solusi yang diusulkan, seperti penyediaan petunjuk teknis, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan penguatan permodalan, diharapkan proses pengajuan pendirian koperasi di Kabupaten Bandung dapat berjalan lebih efektif dan berhasil. Strategi ini bertujuan untuk menjadikan koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat secara optimal. Jika langkah-langkah ini diimplementasikan dengan baik, diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada dan mendukung keberlanjutan koperasi di tingkat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos. 2004. *Kamus Besar Akuntan*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Arnesya, Nadhifa. 2025. "Apa Itu Koperasi Simpan Pinjam: Pengertian, Syarat, Dan Cara Kerjanya." *FLIN*.
- Diniyarti, Agustina. 2020. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEKANISME PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KOPERASI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM." *EPRINTS UNISKA 2* (4).
- Dr. Abdurohim, S.E, M.M. 2023. *PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI* Dr. Abdurohim, S.E, M.M. EUREKA media aksara.
- Haryono, Andi Tri. 2022. "Pendampingan Pendirian Koperasi Syariah Pengabdian Abul Yatama (Kopay) Andi." *JURNAL ABDIDAS 3* (2): 334.
- Idris, Muhammad. 2021. "Koperasi Simpan Pinjam: Pengertian, Contoh, Dan Fungsinya." *Kompas*.
- Malik, Ahmad Dahlan. 2023. *SELUK BELUK PENGURUSAN USAHA BISNIS*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Mare, Bosrin Simare, Adelia Alvi Yana, and Universitas Nusa Mandiri. 2022. "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB PADA." *Indonesian Journal on Networking and Security 11* (2): 72.
- Melati, Rahmadian, and Agriani Hermita Sadeli. 2017. "RELATIONSHIP MARKETING DAN JARINGAN NILAI DI KOPERASI PERTANIAN (STUDI KASUS DI KOPERASI PERTANIAN GERBANG EMAS DI DESA CIBODAS, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT, JAWA BARAT) Rahmadian." *DeReMa Jurnal Manajemen 12* (2): 233.
- Mukhtar Abdul Kader. 2018. "PERAN UKM DAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA." *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen VIII* (1): 19.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Narko. 2004. *Sistem Akuntansi Dilengkapi Dengan Soal Jawaban*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.

- Nasution, Selviana, Sabilah Hidayati, and Putri Rahmadani Nasution. 2024. "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* 3:525. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.160>.
- Nurrachmi, Intan. 2020. "MUAMALAH JAMAAH MASJID ( Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu ' Min Komplek Pasir Jati , Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung )" 7 (1): 57.
- Rochmadi, Ikhsan. 2011. "Analisis Dampak Perdagangan Bebas Dan Global Pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip Dan Tujuan Koperasi." *Ekonomika: Jurnal Ekonomi* 4 (2): 45.
- Shindi, Yunisa. 2024. "PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH PERSPEKTIF ISLAM." *JHIBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 6 (2): 61-62.
- Suryana. 2019. "PENINGKATAN PEMAHAMAN TATA KELOLA PERPAJAKAN KOPERASI BAGI PENGURUS KOPERASI SE-JAWA BARAT." *Akuntansi, Jurnal Dan, Pelaporan Keuangan* 5 (1): 1321.
- Utami, Novia Widya. 2025. "8 Strategi Sukses Membangun Usaha Koperasi." *Mekari Jurnal*.
- Wahyudi. 2023. "PEMBENTUKAN BADAN USAHA BARU KOPERASI SEBAGAI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (3): 686.
- Wira, Lalu, Pria Suhartana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Fakultas Hukum, and Universitas Mataram. 2021. "Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9 (3): 587.